



INFORMASI KERAGAAAN SDM BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU TAHUN 2026

JUMLAH SELURUH PEGAWAI BPBAT TATELU

Sebanyak

87

Orang



ASN

44 27

Orang

Orang

PNS

PPPK

NON-ASN

16

Orang

OUTSOURCING

ASN

Berdasarkan Golongan

Berjumlah 0 Orang

GOLONGAN I

Berjumlah 0 Orang

GOLONGAN II

Berjumlah 29 Orang

GOLONGAN III

Berjumlah 3 Orang

GOLONGAN IV

ASN

Berdasarkan Jabatan

STRUKTURAL

Berjumlah 1 Orang

FUNGSIONAL UMUM

Berjumlah 27 Orang

FUNGSIONAL TERTENTU

Berjumlah 43 Orang

Berdasarkan Jenis Kelamin



24

Orang

Wanita



63

Orang

Pria

Berdasarkan Pendidikan



SD

2 Orang



SMP

0 Orang



SMA

42 Orang



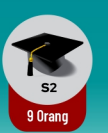
D3 - D4

11 Orang



S1

23 Orang



S2

9 Orang

PELANGGARAN TERKAIT KEPEGAWAIAN

Lingkup BPBAT TateLU

Tahun 2025

Periode Januari - Desember Tahun 2025, **Tim Kode Etik Belum Pernah Menemukan** Pelanggaran Terkait Kepegawaian Baik **Pelanggaran Dalam Kategori Ringan, Sedang, maupun Berat** Di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar TateLU

Total 0

Tahun 2026

Periode Januari - Juni Tahun 2026, **Tim Kode Etik Belum Pernah Menemukan** Pelanggaran Terkait Kepegawaian Baik **Pelanggaran Dalam Kategori Ringan, Sedang, maupun Berat** Di Lingkungan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar TateLU

Total 0



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

JALAN PINILIH JAGA VI DESA TATELU KEC. DIMEMBE KAB. MINAHASA UTARA

SULAWESI UTARA 95373 TELP: 0811-4315-156

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bpbat.tatelu@kkp.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
NOMOR : B.9/BPBAT-T/KP.440/II/2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
PADA SATUAN KERJA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran teknis pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran kegiatan perlu menetapkan struktur organisasi, nama-nama, jabatan dan penugasan Aparatur Sipil Negara dan PPPK sebagai Pengelola Anggaran dan Tim Keuangan, Pengelola Kepegawaian dan Persuratan, Tim Pelayanan Publik, Ketua Tim Kerja, Koordinator, Pelaksana dan Pembantu Pelaksana lingkup Balai perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun Anggaran 2026;

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMENKP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMENKP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Tawar, Perikanan Budidaya Air Payau dan Perikanan Budidaya Laut;

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, No. 47/MEN-KP/KU.611/2022 perihal Perubahan keempat puluh empat atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/MEN/KU.611/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Kantor Daerah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

5. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, No 08/MEN-KP/KP.430/II/2023 tentang Pemberhentian dari jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

MEMUTUSKAN

Memberi Tugas : *(Nama dan Penugasan Terlampir)*
Kepada

Untuk : 1. Menetapkan Nama – nama, Jabatan dan Bidang Penugasan sebagai Pengelola Anggaran dan Tim Keuangan, Pengelola Kepegawaian dan Persuratan, Tim Pelayanan Publik, Ketua Tim Kerja, Koordinator, Pelaksana dan Pembantu Pelaksana lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Penetapan Kepala Balai;
2. Nama – nama yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan Penugasan Lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pembiayaan : Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun Anggaran 2026.

Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tatelu

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Tawar Tatelu,



Christian Maikel Eman

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : B.9/BPBAT-T/KP.440/I/2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

**PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
1	Christian Maikel Eman, S.IK., M.Sc	Kepala BPBAT Tatele	Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
2	Jasmin J. Watung, S.Pi	Kasubbag Umum	1. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial 2. Tim reviu SKP
3	Ir. Danny M. Rimper, M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Madya	1. Ketua Tim Kerja Pakan 2. Pengelola Standarisasi & Sertifikasi (CPPIB) 3. Tim Pelayanan Publik dan Informasi/PPID 4. Pelaksana Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan 5. Tim Adhoc Kampung Perikanan Budi Daya 6. Tim Reviu SKP
4	Edy L. Marpaung, S.Pi, M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Madya	1. Koordinator Jabatan Fungsional 2. Pelaksana Tim Produksi Ikan Mas dan Hias 3. Pelaksana Bantuan Benih Ikan 4. Koordinator Tim Adhoc Kampung Perikanan Budi Daya 5. Agen Perubahan
5	Syauqi Hidayah, S.Pi, M.Si	APK APBN Ahli Muda	1. Ketua Tim Kerja Induk 2. Pejabat PPSPM 3. Pengelola Gudang 4. Pengelola Standarisasi dan Sertifikasi CBIB 5. Pelaksana Bantuan Calon Induk Ikan 6. Tim Reviu SKP
6	Markus Soande, S.St.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Koordinator Tim Maintenance
7	Makkulau Sultan, S.St.Pi, M.Si	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	1. Analisis Penyakit Bakteri 2. Tim Adhoc Kampung Perikanan Budi Daya

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
8	Oxye M. Mitchel, S.Pi	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	1. Analis AMU/AMR
9	Daud W.P. Rumbewas, S.St.Pi	Polkeskan Ahli Muda	1. Ketua Tim Kerja Benih 2. Pengelola Standarisasi dan Sertifikasi (CPIB) 3. Pengelola Gudang 4. Pelaksana Bantuan Bioflok 5. Pelaksana Bantuan Benih Ikan 6. Analis Kualitas Air 7. Pelaksana Tim Produksi Benih Ikan Gabus 8. Tim Reviu SKP
10	Jhonly Solang, S.Pi, M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Pelaksana Bantuan Benih Ikan 2. Pelaksana Tim Produksi Benih Ikan Lele 3. Tim Adhoc Kampung Perikanan Budidaya
11	Rusel, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Anggota Tim Penjualan 2. Pelaksana Bantuan Calon Induk Ikan 3. Pelaksana Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Nila 4. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Lele dan Gurame 5. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin
12	Harry J.W. Tambani, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Pelaksana Bantuan Benih Ikan 2. Pelaksana Tim Produksi benih Ikan Nila 1
13	Muhamad Mahsun Asidqi, S.St.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Pejabat Pembuat Komitmen 2. Pelaksana Bantuan Mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan
14	Francis Ch. E. Wowor, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Pelaksana Bantuan Benih Ikan 2. Pelaksana Tim Produksi Benih Ikan Gurame dan Patin 3. Anggota tim Produksi Benih Ikan Gabus 4. Pengelola Kendaraan dan Alat Berat
15	Apolonia Benediktha, S.St.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Muda	1. Pengelola Kepegawaian 2. Pengelola Manajemen Resiko 3. Tim reviu SKP 4. Pengelola Absensi/Sikepo KKP

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
			5. Pengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
16	Steven Endey, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Pelaksana Bantuan Benih Ikan 2. Pelaksana Tim Produksi Benih Ikan Nilem dan Tawes
17	Devie S.N. Limpong, S.IK	Analisis Akuakultur Ahli Muda	1. Bendahara Pengeluaran
18	Debby D. Saragih, S.St.Pi	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	1. Pengelola Aset BMN 2. Analisis AMU/AMR 3. Operator ASN Digital dan Simpeg KKP
19	Lieke V. Pontoh, S.Pi	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 1
20	Rifani Mopatu	Teknisi Akuakultur Penyelia	1. Pelaksana Tim Produksi Ikan Nila 2 2. Pelaksana Bantuan Benih Ikan
21	Martinus Maniku	Teknisi Akuakultur Penyelia	1. Pelaksana Bantuan Bioflok 2. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Mas dan Hias
22	Algemirol Malatunduh, S.Pi	Teknisi Akuakultur Penyelia	1. Anggota Tim Kerja Pakan 2. Anggota Tim Penjualan
23	Yessy Robot	Teknisi Akuakultur Penyelia	1. Anggota Tim Kerja Pakan
24	Huy Bertus Taka	Teknisi Akuakultur Penyelia	1. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Nila 2. Anggota Tim Calin dan Induk Ikan Lele dan Gurame 3. Anggota Tim Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin
25	Jeinie V. Tulung, S.Pi	Teknisi Akuakultur Penyelia	1. Analisis Penyakit Virus 2. Analisis Penyakit Fungi 3. Tim Pengelola Data (Laboratorium)
26	Rian Fintarji, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	1. Operator SAKIP 2. Operator Program 3. Operator Sidak KKP 4. Tim Reviu SKP 5. Anggota Tim Kerja Sama
27	Joiike Johnny Pomantow	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Gurame dan Patin 2. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Gabus

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
28	Deivi Kaparang, S.Pi	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Anggota Tim Pelayanan Publik dan Informasi 2. Tim Penjualan (Kasir) 3. Resepsionis Gedung Yanblik
29	Joice W.A. Liud, S.Pi	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Tim Teknis PPK 2. Operator BMN Persediaan
30	Jerry Aror	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Anggota Tim Kerja Pakan
31	Jacson O. Saruan	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Anggota Tim Penjualan 2. Anggota tim Produksi Benih Ikan Nila 1
32	Ellen T. Sakamole, S.Pi	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Anggota tim Produksi benih Ikan Nila 2
33	Muhammad Rizali	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 2
34	Samsudaris	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Tim Pengelola Data (Benih Ikan) 2. Anggota Tim Penjualan 3. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Gurame dan Patin 4. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Gabus
35	Christyn N. Rotti	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Tim Produksi Benih Ikan Nila dan Tawes
36	Arne A. Ratulangi, S.Pi, M.Si	Penyusun Laporan Keuangan	1. Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana 2. Operator Kusuka dan Tebar Budidaya 3. Tim Reviu SKP
37	Martua P. Simangunsong, S.Si	Analisis Pengujian	1. Ketua tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2. Tim Reviu SKP 3. Koordinator Tim Penjualan
38	Teddy Pattiserlihun, A.Pi	Analisis Perikanan Budidaya	1. Tim Teknis PPK 2. Tim Maintenance
39	Velix Tambani	Teknisi Akuakultur Mahir	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Mas dan Hias 2. Pengelola Kendaraan dan Alat Berat
40	Tries Susanti Dama, S.Pi	Analisis Tata Usaha	1. Pengelola Kepegawaian 2. Pengelola Persuratan dan Kearsipan 3. Tim Reviu SKP 4. Pengelola Pengarsutamaan Gender 5. Operator ASN Digital dan Simpeg KKP 6. Tim Kerja Sama
41	Verry J. Pandey, S.Pi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nilem dan Tawes

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
42	Kristian Elfis Sumendap, A.Md	Pengelola Keuangan	1. Bendahara PNB dan Gaji 2. Operator Program
43	Samudi	Teknisi Akuakultur Terampil	1. Anggota Tim Produksi Benih ikan Gurame dan Patin 2. Anggota Tim Benih Ikan Gabus
44	Meikel Wonua	Teknisi Akuakultur Terampil	1. Pelaksana Bantuan Calon Induk Ikan 2. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Nila 3. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Lele dan Gurame 4. Pelaksana Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin
45	Lodwyk Wakkary, S.Sos., M.AP	Pengelola BMN	1. Operator BMN Aset 2. Anggota Tim Pelayanan Publik dan Informasi (PPID) 3. Koordinator Tim Kerja Sama 4. Anggota Tim Adhoc Kampung Perikanan Budidaya
46	Helda Imelda Kumontoy, S.Pi	Pengelola Data dan Informasi	1. Koordinator Tim Pelayanan Publik dan Informasi (PPID) 2. Operator Span Laporan
47	Joko Tjahjono	Pengelola Persuratan	1. Pengelola Persuratan dan Kearsipan
48	Ishak Anwar, S.Pi	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	1. Tim Pengelola Data (Calon Induk Ikan) 2. Anggota Tim Produksi Calin & Induk Ikan Nila 3. Pelaksana Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Lele dan Gurame 4. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin 5. Pelaksana Bantuan Calon Induk Ikan
49	Muhammad Novian Saputra, S.Si	Polkeskan Ahli Pertama	1. Tim teknis PPK 2. Operator SAKIP 3. Operator Program 4. Operator Sirup KKP 5. Pengelola Gudang 6. Koordinator tim Pengelola Data 7. Analisis Proksimat 8. Tim Reviu SKP 9. Operator Sirup PBJ KKP

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
50	Mira Maya Sopa, A.Md	Teknisi Kesehatan ikan Terampil	1. Staf Pengelola Keuangan 2. Operator PIPK dan SAIBA 3. Operator Komitmen 4. Analis Hama dan Parasit
51	Dwi Sulastri Anton	Teknisi Akuakultur Pemula	1. Pengelola Persuratan dan Kearsipan 2. Tim Pengelola Data (Perkantoran)
52	Galih Bayu Permana, A.Md.Si	Teknisi Kesehatan Ikan Mahir	1. Tim Teknis PPK 2. Operator BMN Persediaan 3. Operator Komitmen 4. Analis Kualitas Air 5. Operator E-Monev Bappenas
53	Masje Tidajoh	Pengadministrasi Perkantoran	1. Petugas Arsip Dokumen Kantor (Pelayanan Publik) 2. Penanggungjawab Asrama, Jalan dan Gedung Kantor Lainnya.
54	Lili Kasmin	Pengadministrasi Perkantoran	1. Petugas Arsip Dokumen Kantor (Sakip dan Data) 2. Penanggungjawab Gedung dan Halaman Kantor Utama
55	Titi Kasmin	Pengadministrasi Perkantoran	1. Petugas Arsip Dokumen Kantor (Ketatausahaan) 2. Penanggungjawab Gedung dan Halaman Kantor Pelayanan Publik
56	Cicilia A.H. Korompis, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama Desain	1. Staf Pengelola Keuangan
57	Lucky Wawo	Pengadministrasi Perkantoran	1. Tim Maintenance 2. Petugas Arsip Dokumen Kantor (Pakan)
58	Tandri Manangin	Operator Layanan Operasional	1. Tim Maintenance
59	David G.Y. Pantow	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Pelayanan Publik dan Informasi/PPID 2. Pengelola SIPPN Ynbluk MENPANRB
60	Daniel Zem Buntupuang, A.Md	Teknisi Akuakultur Terampil	1. Tim Pengelola Data (Pakan) 2. Anggota Tim Penjualan 3. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 2
61	Frisky Kondoy	Teknisi Akuakultur Pemula	1. Anggota Tim Penjualan 2. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Nila 3. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Lele dan Gurame

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
			4. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin
62	Yusak Johnny Veronika Wantah	Pengelola Umum Operasional	1. Penanggungjawab Gedung dan Halaman Kantor Pelayanan Publik 2. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 1
63	Yulius Langkun	Pengadministrasi Perkantoran	1. Petugas Arsip Dokumen Kantor (Laboratorium) 2. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nilem dan Tawes
64	Resal Wonua	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 1 2. Anggota Tim Penjualan
65	Fendy Tumbelaka	Pengadministrasi Perkantoran	1. Petugas Arsip Dokumen Kantor (Bantuan) 2. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Lele
66	Riski Satiman	Pengelola Umum Operasional	1. Penanggungjawab Asrama, Jalan dan Gedung Kantor Lainnya 2. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Nila 3. Anggota Tim Produksi Clin dan induk Ikan Lele dan gurame 4. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin
67	Subhan Lahay	Pengelola Umum Operasional	1. Penanggungjawab Gedung dan Halaman Kantor Utama 2. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 2
68	Joudy Markos Polii	Pengadministrasi Perkantoran	1. Petugas Arsip Dokumen Kantor (Produksi Ikan) 2. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Nila 3. Anggota Tim Produksi Clin dan induk Ikan Lele dan Gurame 4. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin
69	Dwi Putri Monigi	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Pelayanan Publik dan Informasi (PPID) 2. Resepsionis Gedung Kantor Utama 3. Tim Pengelola Data (Dukungan Teknis)

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN DLM ORGANISASI
			4. Pengelola Aplikasi Sipayangka
70	Maya Katoronang	Operator Layanan Operasional	1. Penanggungjawab Gedung dan Halaman Kantor Utama
71	Danny M. Tandaju	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Nila Anggota Tim Area Komponen Hasil 2. Anggota Tim Produksi Clin dan induk Ikan Lele dan Gurame 3. Anggota Tim Produksi Calin dan Induk Ikan Mas dan Patin
72	Ronny S. Tudus	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Lele
73	Jolly V. Kani	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Kerja Pakan
74	Meifri J. Longdong	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 2
75	Andreano Tandaju	Operator Layanan Operasional	1. Anggota Tim Produksi Benih Ikan Nila 1

Dikeluarkan di : Tatelu

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya

Air Tawar Tatelu,



Christian Maikel Eman



LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Jujur, dan Berintegritas

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tatelu, 8 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

Christian Maikel Eman, S.IK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan	v
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	4
V Catatan Atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	22
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	39
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	41

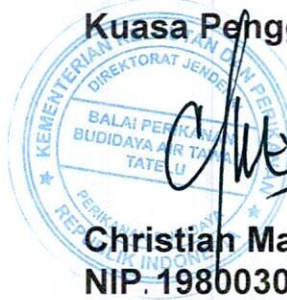
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tatelu, 8 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Christian Maikel Eman, S.IK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp781.517.838 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp781.517.838 atau mencapai 63,40 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.232.596.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17.915.518.730 atau mencapai 95,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.665.744.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp97.600.540.212 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.335.223.973; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp96.038.814.592 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp226.501.647.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp97.600.540.212

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp781.517.838 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp23.741.709.777 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-22.960.191.939, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.810.884.868 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-21.149.307.071.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp101.210.531.911, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-21.149.307.071 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar 405.314.480 dan Transaksi Antar

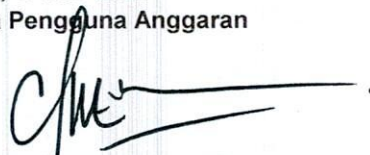
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	1.232.596.000	781.517.838	63,40	1.511.886.345
JUMLAH PENDAPATAN		1.232.596.000	781.517.838	63,40	1.511.886.345
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	8.982.242.000	8.916.490.901	99,27	8.445.896.728
Belanja Barang	B.2.2	9.608.962.000	8.999.027.829	93,65	14.905.143.913
Belanja Modal	B.2.3	74.540.000	-	-	2.480.573.639
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		18.665.744.000	17.915.518.730	95,98	25.831.614.280

Tatelu, 8 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran



Christian Maikel Eman, S.IK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatar	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	1.335.223.973	1.089.119.397
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		1.335.223.973	1.089.119.397
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	5.674.758.000	5.285.989.000
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	22.636.808.366	22.636.808.366
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	102.124.032.904	102.124.032.904
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	11.385.847.778	11.385.847.778
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	301.280.000	301.280.000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	(46.083.912.456)	(41.818.647.120)
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		96.038.814.592	99.915.310.928
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	455.823.985	455.823.985
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	(229.322.338)	(218.300.512)
Jumlah Aset Lainnya		226.501.647	237.523.473
JUMLAH ASET		97.600.540.212	101.241.953.798
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	31.421.887
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	31.421.887
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	31.421.887
EKUITAS			
Ekuitas	C.53	97.600.540.212	101.210.531.911
JUMLAH EKUTAS		97.600.540.212	101.210.531.911
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		97.600.540.212	101.241.953.798

LAPORAN OPERASIONAL

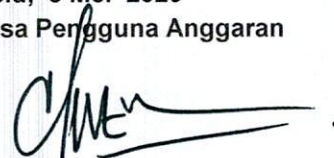
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	781.517.838	1.511.886.345
Jumlah Pendapatan		781.517.838	1.511.886.345
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	8.916.490.901	8.442.262.310
Beban Persediaan	D.4	1.220.715.010	2.715.501.387
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.508.452.368	4.103.439.187
Beban Pemeliharaan	D.6	768.711.716	1.143.087.784
Beban Perjalanan Dinas	D.7	606.679.251	1.994.938.223
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	5.427.827.889	6.986.346.023
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	4.292.832.642	4.336.348.912
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		23.741.709.777	29.721.923.826
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(22.960.191.939)	(28.210.037.481)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	(1.823.800.797)	(1.847.413.240)
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	3.634.685.665	3.377.449.340
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.810.884.868	1.530.036.100
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(21.149.307.071)	(26.680.001.381)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(21.149.307.071)	(26.680.001.381)

Tatelu, 8 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Christiar Maikel Eman, S.IK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

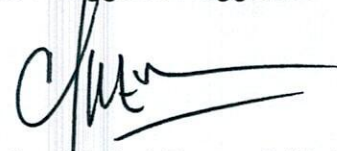
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	101.210.531.911	101.465.933.694
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(21.149.307.071)	(26.680.001.381)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	405.314.480	(75.083.337)
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	405.314.480	(75.083.337)
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		405.314.480	(75.083.337)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	17.134.000.892	26.499.682.935
		(3.609.991.699)	(255.401.783)
EKUITAS AKHIR	E.6	97.600.540.212	101.210.531.911

Tatelu, 8 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Christian Maikel Eman, S.IK, M.Sc
NIP. 19800307 200604 1 001

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar
hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007
- (5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- (6) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (8) Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-156/PB.6/2023 tentang Update Aplikasi Calk Satker dan Penggunaan Aplikasi Calk Satker BLU

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada Bab VI Bagian Kesatu Pasal 76 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Pada Pasal 77 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pemBudi Dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pemBudi Dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pemBudi Dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pemBudi Dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pemBudi Dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pemBudi Dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- (3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pemBudi Dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pemBudi Dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pemBudi Dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- (4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pemBudi Dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pemBudi Dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pemBudi Dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;

- (5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pemBudi Dayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pemBudi Dayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pemBudi Dayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan;
- (6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya; dan
- (7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu yang merupakan unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan Budi Daya air tawar, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut:

- (1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan Budi Daya air tawar;
- (2) Pelaksanaan uji terap teknik perikanan Budi Daya air tawar;
- (3) Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan Budi Daya air tawar;
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan Budi Daya air tawar;
- (5) Pelaksanaan kerja sama teknis perikanan Budi Daya air tawar;
- (6) Pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan Budi Daya air tawar.
- (7) Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan Budi Daya air tawar;
- (8) Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan Budi Daya air tawar;
- (9) Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan Budi Daya air tawar;
- (10) Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan Budi Daya air tawar, dan
- (11) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pada Tahun 2025, visi, misi, dan arah kinerja Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu mengacu pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu berkomitmen untuk mendukung pencapaian visi nasional tersebut melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan Budi Daya air tawar, seperti uji terap teknologi, produksi benih, layanan laboratorium, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi. Seluruh kegiatan Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu diarahkan untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

Tujuan Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu

- (1) Meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia;
- (2) Meningkatkan efektifitas dan produktifitas kinerja;
- (3) Menyediakan teknologi adaptif Budi Daya;
- (4) Menyediakan bahan potensi pengembangan kawasan Budi Daya;
- (5) Menyediakan/menghasilkan benih dan induk bermutu, ikan dan non ikan serta
- (6) Meningkatkan efektifitas kinerja;
- (7) Mempercepat penyebaran teknologi dan ilmu dibidang perikanan;
- (8) Meningkatkan keterampilan pemBudi Dayaan ikan dan tenaga pendamping
- (9) Melestarikan sumberdaya perikanan Budi Daya.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa Kebijakan Strategis sebagai

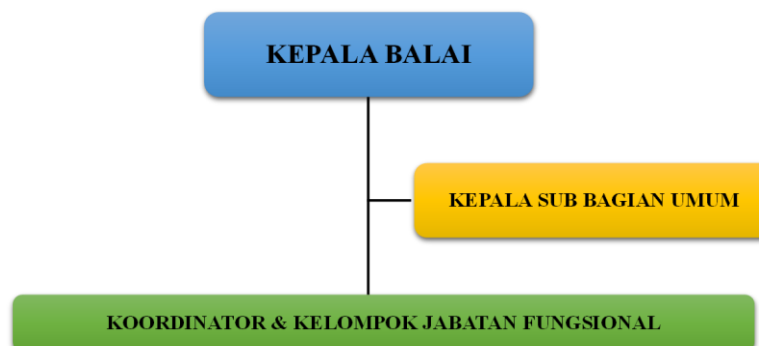
- (1) Meningkatkan rekayasa teknologi dalam rangka menyediakan teknologi adaptif;
- (2) Peningkatan rekayasa teknologi produksi benih dan induk ikan dalam rangka menyediakan benih ikan bermutu;
- (3) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Balai dalam rangka mempercepat penyebaran ilmu dan teknologi di bidang perikanan;
- (4) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perjanjian Kinerja Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu tahun 2025 merupakan bentuk komitmen antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Perjanjian ini memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), target yang ingin dicapai, serta dukungan sumber daya yang diperlukan guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA AIR TAWAR TATELU**

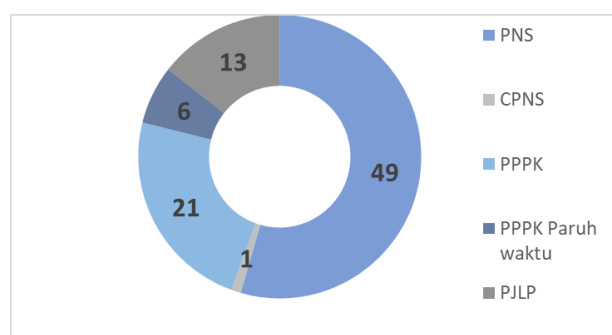
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	1.	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar untuk Bantuan dan Operasional UPT BPBAT Tatelu (Ekor)	26.768
	2.	Benih Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu (Ekor)	4.450.610
	3.	Pakan Ikan Air Tawar yang Diproduksi untuk Operasional UPT BPBAT Tatelu (Kg)	14.070
	4.	Sarana Budi Daya Ikan Air Tawar yang Disalurkan ke Masyarakat Satker BPBAT Tatelu (Unit)	19
	5.	Sampel Pakan Ikan yang Diuji Satker BPBAT Tatelu (Sampel)	9
	6.	Sampel Penyakit Ikan Air Tawar yang Diuji Dalam Rangka Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Satker BPBAT Tatelu (Sampel)	380
2. Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	7.	Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBAT Tatelu (Orang)	400
	8.	Sampel Monitoring Penyakit Ikan dan AMR yang Diuji Satker BPBAT Tatelu (Sampel)	12
3. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBAT Tatelu	9.	Nilai PM SAKIP Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	84
	10.	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAT Tatelu (Indeks)	81
	11.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup BPBAT Tatelu (%)	100
	12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBAT Tatelu (%)	85
	13.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas	76

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dari Korupsi Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	
	14. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	92
	15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	71,5
	16. Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBAT Tatelu (Indeks)	3
	17. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif Terhadap Total Pemberitaan Tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya Lingkup BPBAT Tatelu (%)	≥86
	18. Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	≥80
	19. Persentase Layanan Perkantoran Satker BPBAT Tatelu (%)	80
	20. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Satker BPBAT Tatelu (Nilai)	70
	21. Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAT Tatelu (%)	65

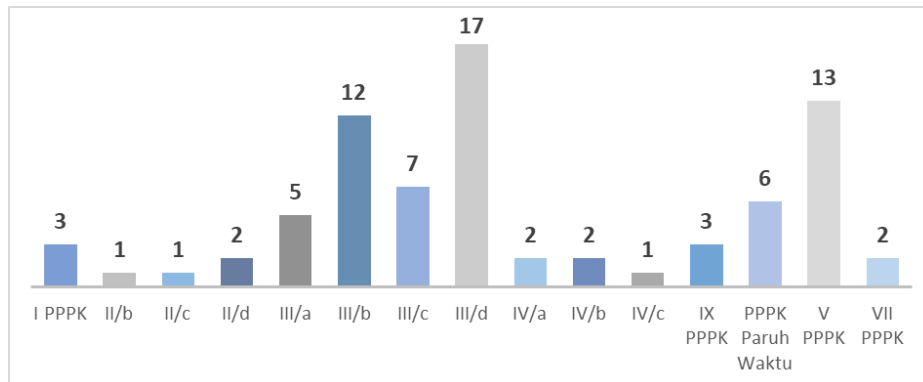


Struktur Organisasi Balai

Pada Tahun 2025, BPBAT Tatelu didukung oleh total 90 orang pegawai, yang terdiri atas 49 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 21 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu (PPPK), 6 PPPK paruh waktu, serta 13 tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Komposisi SDM tersebut mencerminkan sinergi antara aparatur sipil negara dan tenaga pendukung non-ASN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan teknis, administrasi, serta pelayanan publik di bidang perikanan budidaya air tawar



Sedangkan pengelompokan ASN berdasarkan golongan ruang di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu dapat dilihat pada tabel berikut:



A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.232.596.000	1.232.596.000
Jumlah Pendapatan	1.232.596.000	1.232.596.000
Belanja		
Belanja Pegawai	8.910.368.000	8.982.242.000
Belanja Barang	10.340.046.000	9.608.962.000
Belanja Modal	139.540.000	74.540.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	19.389.954.000	18.665.744.000

Realisasi
Pendapatan
Rp781.517.838

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp781.517.838 atau mencapai 63,40 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.232.596.000. Pendapatan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp781.517.838. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.232.596.000	781.517.838	63,40
Jumlah	1.232.596.000	781.517.838	63,40

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 48,31 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	781.517.838	1.511.886.345	(48,31)
Jumlah	781.517.838	1.511.886.345	(48,31)

Realisasi
Penerimaan Pajak
Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp781.517.838

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp781.517.838 dan Rp1.511.886.345. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 48,31 dari TA 2024 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada menurunnya tingkat produksi hasil perikanan, sehingga berpengaruh langsung terhadap capaian pendapatan yang diperoleh.. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	781.517.838	1.511.886.345	(48,31)
Jumlah	781.517.838	1.511.886.345	(48,31)

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	637.943.269	1.206.722.768	(47,13)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	142.908.569	53.885.400	165,21
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	53.688.350	(100,00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	666.000	130.000	412,31
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.714.827	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	194.745.000	(100,00)
Jumlah	781.517.838	1.511.886.345	(48,31)

Realisasi Belanja
Rp17.915.518.730

B.2 Belanja

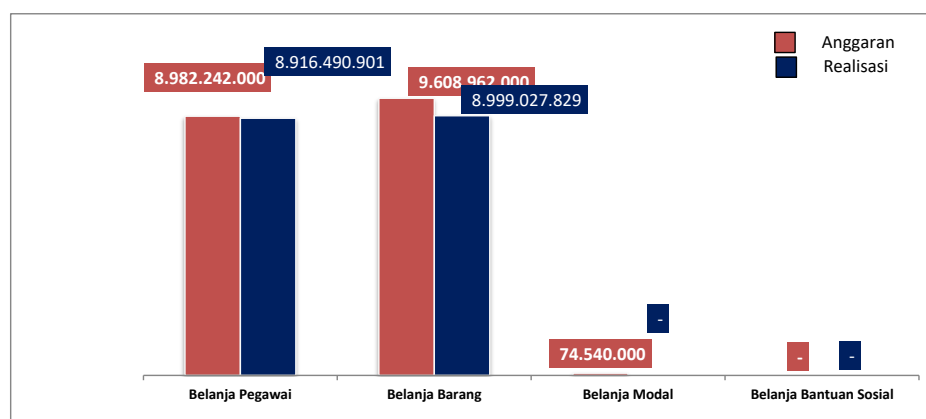
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp17.915.518.730 atau 95,98 % dari anggaran belanja sebesar Rp.18.665.744.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025

U R A I A N	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	8.982.242.000	8.916.490.901	99,27
Belanja Barang	9.608.962.000	8.999.027.829	93,65
Belanja Modal	74.540.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	18.665.744.000	17.915.518.730	95,98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 30,64% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	8.916.490.901	8.445.896.728	5,57
Belanja Barang	8.999.027.829	14.905.143.913	(39,62)
Belanja Modal	-	2.480.573.639	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	17.915.518.730	25.831.614.280	(30,64)

*Realisasi Belanja Pegawai
Rp8.916.490.901*

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.916.490.901 dan Rp8.445.896.728. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,57 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui mutasi sebanyak satu orang, pengangkatan CPNS sebanyak satu orang, serta pengangkatan PPPK sebanyak 16 orang pada bulan Oktober. Selain itu, peningkatan juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan grade tunjangan kinerja bagi beberapa jabatan.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2.965.505.740	3.002.807.000	(1,24)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.202	41.809	(3,84)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	242.340.684	246.264.530	(1,59)
Belanja Tunj. Anak PNS	77.180.964	76.352.500	1,09
Belanja Tunj. Struktural PNS	27.900.000	32.760.000	(14,84)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	97.575.000	215.070.000	(54,63)
Belanja Tunj. PPh PNS	23.885.428	25.470.274	(6,22)
Belanja Tunj. Beras PNS	163.524.360	165.045.180	(0,92)
Belanja Uang Makan PNS	425.899.000	413.806.000	2,92
Belanja Tunjangan Umum PNS	26.610.000	23.870.000	11,48
Belanja Gaji Pokok PPPK	290.932.700	141.330.000	105,85
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.867	2.929	100,31
Jumlah Belanja kotor	8.918.852.115	8.447.780.902	5,58
Pengembalian Belanja Pegawai	2.361.214	1.884.174	25,32
Jumlah Belanja	8.916.490.901	8.445.896.728	5,57

*Realisasi Belanja
Barang
Rp8.999.027.829*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.999.027.829 dan Rp14.905.143.913. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 39,62% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	187.436.800	2.037.545.125	(90,80)
Belanja Barang Non Operasional	253.987.355	1.031.833.942	(75,38)
Belanja Barang Persediaan	977.927.747	2.866.955.452	(65,89)
Belanja Jasa	2.098.819.526	1.034.357.088	102,91
Belanja Pemeliharaan	826.631.076	1.152.466.328	(28,27)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	606.679.251	1.995.097.123	(69,59)
Jumlah Belanja Kotor	8.999.397.255	14.907.621.213	(39,63)
Pengembalian Belanja	369.426	2.477.300	(85,09)
Jumlah Belanja	8.999.027.829	14.905.143.913	(39,62)

Realisasi Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.480.573.639. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga belanja difokuskan pada kebutuhan yang paling prioritas dan mendesak..

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	810.432.022	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	1.687.135.292	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	2.497.567.314	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	16.993.675	(100,00)
Jumlah Belanja	-	2.480.573.639	(100,00)

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan pengadaan tanah baru serta merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp810.432.022, mengalami penurunan sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.687.135.292 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk meningkatkan fungsi dan nilai aset gedung dan bangunan yang sudah ada..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	1.105.429.536	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	1.687.135.292	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	16.993.675	(100,00)
Jumlah Belanja	-	1.670.141.617	(100,00)

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya kebutuhan pembangunan atau peningkatan infrastruktur tersebut serta dalam rangka efisiensi anggaran.

*Realisasi Belanja
Modal Lainnya Rp0*

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran serta tidak adanya kebutuhan pengadaan pada kategori tersebut..

*Realisasi Belanja
Bantuan Sosial Rp0*

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial tidak adanya program atau kegiatan yang dialokasikan untuk penyaluran bantuan sosial pada tahun berjalan.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	180.000.000	-
Jumlah	180.000.000	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

*Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp0*

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

*Uang Muka Belanja
(prepayment) Rp0*

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Perpajakan Rp0

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Rp0

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan
Pajak Rp0*

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

*Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0*

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tu
ntutan Ganti Rugi
Rp0

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tu
ntutan Ganti Rugi
Rp0

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Persediaan
Rp1.335.223.973

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.335.223.973 dan Rp1.089.119.397. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	66.725.492	183.532.477
Suku Cadang	9.568.200	429.000
Bahan untuk Pemeliharaan	425.000	-
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau	653.043.241	497.539.102
Bahan Baku	10.428.450	76.386.808
Persediaan Lainnya	593.458.590	297.414.510
Jumlah	1.333.648.973	1.055.301.897

Persediaan yang
Belum Diregister
Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tu
ntutan Ganti Rugi
Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited)
TA 2025 dan 2024*

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya
Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Jgk Panjang
Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi
Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi
Penyusutan Properti
Investasi Rp0

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi

Tanah
Rp5.674.758.000

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.674.758.000 dan Rp5.285.989.000. Nilai Tanah tersebut merupakan tanah dan bangunan milik pemerintah yang terdiri atas tanah dan bangunan kantor seluas 109.893 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp5.268.251.000,- serta tanah muara seluas 400 m² dengan nilai perolehan sebesar Rp17.738.000,-. Kedua aset tersebut telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagai aset tetap berupa tanah, dan merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	5.285.989.000
Mutasi tambah :	-
Mutasi kurang :	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.285.989.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	109.893	Jl. Pinilih, Desa Tatelu Jaga VI	5.268.251.000
2	400	Jl. Pinilih, Desa Tatelu Jaga VI	17.738.000
Jumlah			5.285.989.000

Tanah Belum
Diregister Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp22.636.808.366

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp22.636.808.366 dan Rp22.636.808.366. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	22.636.808.366
Mutasi tambah:	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	22.636.808.366
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(18.745.329.396)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	3.891.478.970

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister
Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan
Bangunan
Rp102.124.032.904

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp102.124.032.904 dan Rp102.124.032.904. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	102.124.032.904
Mutasi tambah:	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2025	102.124.032.904
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(21.724.241.378)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	80.399.791.526

Gedung dan
Bangunan Belum
Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp11.385.847.778

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.11.385.847.778 dan Rp.11.385.847.778. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	11.385.847.778
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	11.385.847.778
Akumulasi Penyusutan s.d.	(5.614.341.682)
Nilai Buku per	5.771.506.096

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp301.280.000

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.301.280.000 dan Rp.301.280.000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	301.280.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	301.280.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	301.280.000

Aset Tetap yang Belum Diregister
Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp46.083.912.456

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp46.083.912.456 dan Rp41.818.647.120. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	22.636.808.366	(18.745.329.396)	3.891.478.970
2	Gedung dan Bangunan	102.124.032.904	(21.724.241.378)	80.399.791.526
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.385.847.778	(5.614.341.682)	5.771.506.096
4	Aset Tetap Lainnya	301.280.000	-	301.280.000
Akumulasi Penyusutan		136.447.969.048	(46.083.912.456)	90.364.056.592

Aset Konsesi Jasa
Rp0

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
Jumlah	-	-

Kemitraan Dengan
Pihak Ketiga Rp0

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
Jumlah		-

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu berupa Software

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp0

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

**Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp0**

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
Total	-	-

**Dana Cadangan
Perwakilan RI di
Luar Negeri Rp0**

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
	-	-
Total	-	-

**Aset Lain-lain
Rp455.823.985**

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp455.823.985 dan Rp455.823.985. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	455.823.985
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	455.823.985
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	(229.322.338)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	226.501.647

**Aset Lainnya yang
Belum Diregister
Rp0**

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
229.322.338*

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp229.322.338 dan Rp218.300.512. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	455.823.985	(229.322.338)	226.501.647
-	-	-	-
Total	455.823.985	(229.322.338)	226.501.647

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0*

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp31.421.887. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Belanja barang yang masih harus dibayar	-	31.421.887
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	-
Total	-	31.421.887

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang pihak ketiga per 31 Desember 2024, utang kepada pihak ketiga tercatat sebesar Rp31.421.887,-, yang berasal dari tagihan listrik bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan hingga akhir tahun anggaran.

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0*

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
Jumlah	-

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Utang Jangka Pendek Lainnya

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Kewajiban Konsesi Jasa Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
Total	-	-

Ekuitas Rp97.600.540.212

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp97.600.540.212. dan Rp101.210.531.911. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan Perpajakan
Rp0

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp781.517.838

Beban Pegawai
Rp8.916.490.901

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh tidak ada jenis pendapatan yang termasuk dalam kategori perpajakan yang dikelola secara langsung oleh satuan kerja.

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp781.517.838 dan Rp1.511.886.345. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 48,31. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada menurunnya tingkat produksi hasil perikanan, sehingga berpengaruh langsung terhadap capaian pendapatan yang diperoleh.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	637.943.269	1.206.722.768,00	(47,13)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	142.908.569	53.885.400,00	165,21
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	53.688.350,00	(100,00)
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	666.000	130.000,00	412,31
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	2.714.827,00	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	194.745.000,00	(100,00)
Jumlah	781.517.838,00	1.511.886.345,00	(48,31)

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.916.490.901 dan Rp8.442.262.310.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 5,62 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui mutasi sebanyak satu orang, pengangkatan CPNS sebanyak satu orang, serta pengangkatan PPPK sebanyak 16 orang pada bulan Oktober. Selain itu, peningkatan juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan grade tunjangan kinerja bagi beberapa jabatan, termasuk pejabat fungsional Analis Akuakultur dan jabatan lainnya.. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.965.505.740	3.002.807.000	(1,24)
Beban Pembulatan Gaji PNS	40.132	41.176	(2,54)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	242.340.684	246.264.530	(1,59)
Beban Tunj. Anak PNS	77.180.964	76.352.500	1,09
Beban Tunj. Struktural PNS	27.900.000	32.760.000	(14,84)
Beban Tunj. Fungsional PNS	97.575.000	215.070.000	(54,63)
Beban Tunj. PPh PNS	23.885.428	25.470.274	(6,22)
Beban Tunj. Beras PNS	163.524.360	165.045.180	(0,92)
Beban Uang Makan PNS	425.899.000	412.895.250	3,15
Beban Tunjangan Umum PNS	26.610.000	23.870.000	11,48
Beban Gaji Pokok PPPK	290.932.700	141.330.000	105,85
Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.867	2.929	100,31
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	18.047.210	7.688.640	134,73
Beban Tunjangan Anak PPPK	2.863.124	768.864	272,38
Beban Tunjangan Beras PPPK	16.222.080	6.083.280	166,67
Beban Uang Makan PPPK	64.331.000	26.426.000	143,44
Beban Uang Lembur	159.274.000	48.905.500	225,68
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3.922.387.757	3.833.792.183	2,31
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	383.550.855	176.689.004	117,08
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	900.000	-	-
Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.515.000	-	-
Jumlah	8.916.490.901	8.442.262.310	5,62

Beban Persediaan
Rp1.220.715.010

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.220.715.010 dan Rp2.715.501.387

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 55,05 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	1.056.903.472	2.466.542.227	(57,15)
Beban Persediaan bahan baku	115.549.078	130.509.387	(11,46)
Beban persediaan lainnya	48.262.460	118.449.773	(59,25)
Jumlah Beban Persediaan	1.220.715.010,00	2.715.501.387	(55,05)

Beban Barang dan Jasa
Rp2.508.452.368

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.508.452.368 dan Rp4.103.439.187.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 38,87 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan, dengan fokus pada pengeluaran yang benar-benar prioritas. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	-	1.719.608.932	(100,00)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	63.953.100	115.656.646	(44,70)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	564.300	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	112.560.000	124.944.000	(9,91)
Beban Barang Operasional Lainnya	10.923.700	76.771.247	(85,77)
Beban Bahan	7.732.200	298.320.226	(97,41)
Beban Honor Output Kegiatan	-	645.600.000	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	246.255.155	87.913.716	180,11
Beban Langganan Listrik	213.650.042	351.555.369	(39,23)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	99.694.230	124.810.083	(20,12)
Beban Jasa Profesi	-	25.500.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	1.753.683.941	490.194.668	257,75
Beban Sewa	-	42.000.000	(100,00)
Jumlah	2.508.452.368	4.103.439.187,00	(38,87)

Beban Pemeliharaan
Rp768.711.716

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp768.711.716 dan Rp1.143.087.784.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 32,75 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran serta pemanfaatan sumber daya secara lebih optimal dalam mendukung operasional sarana dan prasarana. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	184.913.565	412.208.391	(55,14)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	161.581.500	200.563.377	(19,44)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	317.706.341	340.326.470	(6,65)
Beban Pemeliharaan Jaringan	47.820.750	70.085.340	(31,77)
Beban Pemeliharaan Lainnya	35.156.360	62.479.150	(43,73)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.767.000	51.720	5.249,96
Beban Persediaan suku cadang	18.766.200	57.373.336	(67,29)
Jumlah	768.711.716	1.143.087.784	(32,75)

Beban Perjalanan Dinas
Rp606.679.251

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp606.679.251 dan Rp1.994.938.223
Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 69,59 persen disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas kedinasan, seperti rapat daring dan koordinasi virtual.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.501.000	55.622.000	(70,33)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	279.240.990	689.293.411	(59,49)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	101.850.000	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	310.937.261	1.148.172.812	(72,92)
Jumlah	606.679.251,00	1.994.938.223	(69,59)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp5.427.827.889

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.427.827.889 dan Rp6.986.346.023
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 22,31 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran serta penyesuaian jumlah bantuan yang disalurkan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan penerima.. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	1.239.399.889	1.628.473.268,00	(23,89)
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	4.047.915.500	4.787.047.755,00	(15,44)
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	140.512.500	570.825.000,00	(75,38)
Jumlah	5.427.827.889,00	6.986.346.023	(22,31)

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp4.292.832.642

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.292.832.642 dan Rp4.336.348.912.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.069.815.244	1.100.895.060	(2,82)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.582.313.499	2.560.509.831	0,85
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	185.159.803	161.083.289	14,95
Beban Penyusutan Irigasi	425.580.294	429.548.833	(0,92)
Beban Penyusutan Jaringan	18.941.976	18.941.977	(0,00)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	11.021.826	65.369.922	(83,14)
Jumlah Penyusutan	4.292.832.642	4.336.348.912	(1,00)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	4.292.832.642	4.336.348.912	(1,00)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-1.823.800.797

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-1.823.800.797 dan Rp-1.847.413.240

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pelepasan Aset	(1.820.338.017)	(1.833.568.240,00)	(1)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(3.462.780)	(13.845.000,00)	(75)
Jumlah	(1.823.800.797,00)	(1.847.413.240)	(1)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non Operasional
Lainnya Rp3.634.685.665

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.634.685.665 dan Rp3.377.449.340.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	3.634.685.665	3.344.369.340,00	8,68
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	33.080.000,00	(100,00)
Jumlah	3.634.685.665,00	3.377.449.340	7,62

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.101.210.531.911,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.101.210.531.911,00 dan

Defisit LO

Rp.21.149.307.071,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.21.149.307.071,00 dan Rp.26.680.001.381,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.405.314.480 dan Rp.-75.083.337 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi
Rp405.314.480

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.405.314.480 dan Rp.-75.083.337. .

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
-	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp17.134.000.892

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.17.134.000.892 dan Rp.26.499.682.935. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.915.518.730
Diterima dari Entitas Lain	(781.517.838)
Jumlah	17.134.000.892

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 17.915.518.730, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 781.517.838

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.97.600.540.212,00 dan Rp.101.210.531.911,00.

Ekuitas Akhir
Rp97.600.540.212

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor B.372/ITJ.3/KP.440/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 untuk melaksanakan Pemantauan Realisasi Anggaran pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu di Provinsi DKI Jakarta secara daring, yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni s.d. 3 Juli 2025. Dari hasil pelaksanaan pemantauan tersebut, ditemukan beberapa temuan yang memerlukan tindak lanjut dan perbaikan, antara lain sebagai berikut:

- (1) Terdapat pembayaran tunjangan kinerja kepada pegawai yang jam kerjanya tidak memenuhi ketentuan, dengan total nilai sebesar Rp2.223.144,00. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktunya (PSW), tidak melakukan presensi pagi/sore, tidak melakukan presensi pagi dan sore, serta adanya kesalahan dalam penentuan kelas jabatan. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pengembalian ke kas negara melalui billing 702507082959057, dengan NTPN 8679F522CPIG4I6H dan NTB 903403081218.
- (2) Terdapat pembayaran atas kegiatan lembur pegawai yang perhitungannya tidak sesuai dengan rekaman presensi, sehingga berpotensi menimbulkan kelebihan pembayaran dan bertentangan dengan ketentuan administrasi keuangan negara. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp138.000,- melalui billing 702507082959079, dengan NTPN FA29D7NAS99LBI77 dan NTB 903412081227.
- (3) Ditemukan kelebihan pembayaran honorarium kepada pegawai PPNPN karena yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa keterangan, namun honorarium tetap dibayarkan penuh tanpa adanya pemotongan sesuai ketentuan. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan pengembalian ke kas negara sebesar Rp369.426,00 melalui billing 702507082959103, dengan NTPN 201CE7NAS99LBI7V dan NTB 903433081241.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Penetapan Kepala Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu Nomor B.51/BPBAT-T/PL.110/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, perihal Penetapan Tim Pengelola Administrasi Keuangan Satuan Kerja Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu Tahun Anggaran 2025, maka susunan tim dimaksud adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Christian Maikel Eman, S.IK, M.Sc
Pejabat Pembuat Komitmen	: Muh. Mahsun Asidqi, S.St.Pi
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Syauqy Hidayah, S.Pi, M.Si
Bendahara Pengeluaran	: Devie SN Limpong, S.IK
Bendahara Penerimaan	: Kristian Elfis Sumendap, A.Md

Pengungkapan Capaian Rincian Output Perfungsi APBN

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu terdapat pada fungsi Ekonomi (04) dan sub fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (04.03) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Rincian Output	Satuan	Target Volume	Realisasi Volume	Pagu	Realisasi	Persen
1	EKONOMI				18.665.744.000	17.915.518.800	95,98%
2	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN				18.665.744.000	17.915.518.800	95,98%
3	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				6.150.318.000	5.514.223.725	89,66%
4	Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar				6.150.318.000	5.514.223.725	89,66%
5	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				126.358.000	57.901.037	45,82%
6	Sampel Nutrisi Pakan Ikan Air Tawar	Sampel	9	17	4.770.000	-	0,00%
7	Sampel Kualitas Air Ikan Air Tawar Layanan UPT	Sampel	292	292	61.028.000	57.901.037	94,88%
8	Sampel Mikrobiologi Layanan UPT	Sampel	60	60	33.120.000	-	0,00%
9	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Tawar Layanan UPT	Sampel	28	28	27.440.000	-	0,00%
10	Bantuan Peralatan / Sarana				4.355.060.000	4.343.253.624	99,73%
11	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	22	22	4.355.060.000	4.343.253.624	99,73%
12	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	22	22	4.355.060.000	4.343.253.624	99,73%
13	Bantuan Hewan				1.029.699.000	889.358.374	86,37%
14	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	8177	11417	295.152.000	295.066.010	99,97%
15	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Ekor	2147799	4450610	734.547.000	594.292.364	80,91%
16	Penyidikan dan Pengujian Penyakit				10.968.000	10.795.650	98,43%
17	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	Sampel	12	12	10.968.000	10.795.650	98,43%
18	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan				628.233.000	212.915.040	33,89%
19	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	Unit	15351	15351	445.179.000	49.994.790	11,23%
20	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Unit	14070	14070	183.054.000	162.920.250	89,00%
21	Program Dukungan Manajemen				12.515.426.000	12.401.295.075	99,09%
22	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya				12.515.426.000	12.401.295.075	99,09%
23	Layanan Dukungan Manajemen Internal				12.234.786.000	12.122.054.085	99,08%
24	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	1	1	24.760.000	24.241.200	97,90%
25	Layanan Umum	Layanan	1	1	21.546.000	21.375.700	99,21%
26	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	12.188.480.000	12.076.437.185	99,08%
27	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	12.188.480.000	12.076.437.185	99,08%
28	Layanan Manajemen Kinerja Internal				280.640.000	279.240.990	99,50%
29	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	110.820.000	109.665.262	98,96%
30	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	69.900.000	69.871.740	99,96%
31	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1	89.940.000	89.876.488	99,93%
32	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	1	1	9.980.000	9.827.500	98,47%

Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	No.	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
Swasembada Pangan	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	4.355.060.000	4.343.253.624	99,73%
		2	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	295.152.000	295.066.010	99,97%
		3	Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	734.547.000	594.292.364	80,91%
		4	Sampel Surveilans Resistensi Antimikroba Ikan Air Tawar (AMU/AMR) yang diuji	10.968.000	10.795.650	98,43%
		5	Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang Diproduksi	445.179.000	49.994.790	11,23%
		6	Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	183.054.000	162.920.250	89,00%
				6.023.960.000	5.456.322.688	90,58%

Total pagu anggaran sebesar Rp6.023.960.000 telah direalisasikan sebesar Rp5.456.322.688, dengan tingkat realisasi mencapai 90,58%, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan cukup optimal.

Kegiatan penyaluran sarana budi daya air tawar kepada masyarakat didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp4.355.060.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.343.253.624 atau 99,73%. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan berhasil mendukung peningkatan kegiatan budidaya ikan di masyarakat.

Penyaluran calon induk unggul ikan air tawar kepada masyarakat memiliki pagu anggaran sebesar Rp295.152.000 dengan realisasi Rp295.066.010 atau 99,97%. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kegiatan penyaluran telah dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Kegiatan penyaluran benih ikan air tawar didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp734.547.000 dengan realisasi Rp594.292.364 atau 80,91%. Meskipun realisasi belum mencapai 100%, kegiatan ini tetap memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebutuhan benih bagi masyarakat pembudidaya.

Pengujian sampel surveilans resistensi antimikroba ikan air tawar memiliki pagu anggaran sebesar Rp10.968.000 dan direalisasikan sebesar Rp10.795.650 atau 98,43%. Realisasi ini menunjukkan bahwa kegiatan pengujian berjalan dengan baik sebagai bagian dari pengawasan kesehatan ikan budidaya.

Kegiatan produksi calon induk unggul ikan air tawar didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp445.179.000 dengan realisasi Rp49.994.790 atau 11,23%. Rendahnya tingkat realisasi menunjukkan bahwa kegiatan produksi belum terlaksana secara optimal selama periode pelaporan.

Produksi pakan ikan untuk mendukung operasional UPT memiliki pagu anggaran sebesar Rp183.054.000 dengan realisasi Rp162.920.250 atau 89,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan produksi pakan telah berjalan cukup baik